

Judul : Kemendagri Akui Lobi-Lobi ASN Bisa Terjadi
Tanggal : Selasa, 19 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Kemendagri Akui Lobi-Lobi ASN Bisa Terjadi

Para partai politik disinyalir bakal memanfaatkan momentum penunjukan pejabat kepala daerah untuk persiapan Pemilu 2024.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak publik mengawal bersama-sama proses pengisian pejabat kepala daerah. Pada 2022 akan ada 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya, 7 di antaranya gubernur.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengemukakan hal itu saat merespons adanya dugaan upaya lobi-lobi oleh aparat sipil negara (ASN) yang ingin mengisi jabatan tersebut. Ia mengakui bisa saja ada pihak yang berusaha melakukan lobi, tetapi itu tidak akan menembus Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Upaya orang bermacam-macam, ada yang mendekati ini itu yang dipikir bisa mempengaruhi Mendagri. Tapi tidak mampun karena kita ingin menjaga kewibawaan Kemendagri," tegas Benni.

Ia menjelaskan pengangkatan pejabat kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, UU Pilkada, dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta PP No 42/2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor

6/2005.

"PP menjadi rujukan untuk menentukan kriteria, indikator, tugas, dan kewenangan hal yang boleh dan tidak boleh. Semua pihak memahami itu. Kita mengharapkan publik mengikuti prosesnya," terang Benni.

Untuk pengisian jabatan gubernur, Benni mengatakan Mendagri Tito Karnavian, sesuai aturan mengusulkan tiga nama pada presiden. Kemudian, untuk pengisian pejabat bupati dan wali kota, gubernur yang akan mengusulkan nama pada Mendagri untuk disetujui presiden.

Kemendagri, ujar dia, turut menerima masukan dari publik, mulai masyarakat, asosiasi, hingga DPR tentang nama-nama calon pejabat. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan adanya dugaan politik uang dalam penempatan pejabat kepala daerah tersebut logis. Hal itu lantaran para calon pejabat daerah ini diberikan keleluasaan untuk memberikan kebijakan penyusunan APBD.

"Sehingga mereka bernafsu. Di sini khususnya ASN untuk bupati dan wali kota. Di sini mereka berlomba-lomba," papar Trubus kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Menurutnya, para partai politik juga akan memanfaatkan momentum penunjukan pejabat kepala daerah tersebut untuk persiapan Pemilu

2024. "Tidak adanya transparansi, jadi problem sendiri. Penunjukannya khusus karena kriteria hanya ASN eselon 1 untuk gubernur dan eselon dua untuk wali kota," ujarnya.

Trubus pun meminta kepada lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga hukum lainnya untuk turun langsung dan memberikan pengawasan yang ketat. KPK dan lembaga hukum lainnya perlu ikut mengawasi mulai dari perekrutan hingga pelaksanaan tugas pejabat kepala daerah.

Bahas anggaran

Dalam kaitan persiapan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah meninjau usulan anggaran untuk diajukan pada rapat dengan DPR dan pemerintah berikutnya. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya akan melakukan konsinyering pada 21-23 April mendatang.

"Konsinyering akan membahas detail-detailnya tahapan. KPU juga nanti akan menyisir anggaran," ungkap Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Awalnya KPU mengusulkan Rp86 triliun. Namun, pemerintah keberatan karena upaya pemulihan dari dampak covid-19 masih perlu dana besar.

KPU pun memangkas usulan anggaran menjadi Rp76,6 triliun dan kini masih mengupayakan penghematan di sejumlah pos anggaran sesuai keinginan pemerintah.

Hasyim mengatakan KPU juga akan melakukan konsinyering pada Mei mendatang. (Ykb/p2)



MENANG DI PEMILU 2024: Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Dapil Jember-Lumajang Charles Melkyansyah (tengah) berfoto bersama pengurus sesuai pelantikan ratusan pengurus DPD, DPC Partai NasDem Kabupaten Lumajang oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur Sri Sajekti Sudjunadi di Lumajang, Jatim, Minggu (17/4). Partai NasDem menargetkan memenangkan Pemilu 2024 di Lumajang.